

**PENANGANAN PELANGGARAN HAM BERAT
MASA LALU DI INDONESIA**
*(Studi Atas Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran
Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu)*

TESIS
Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Magister dalam Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh
AHMAD ZAINURI
NIM. 02040422028

PASCASARJANA HUKUM TATA NEGARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2023

PERTANYAAN KEASLIAN

PERTANYAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ahmad Zainuri

NIM : 02040422028

Program : Magister Hukum Tata Negara

Institusi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Desember 2023 M.
Saya yang menyatakan,



Ahmad Zainuri

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

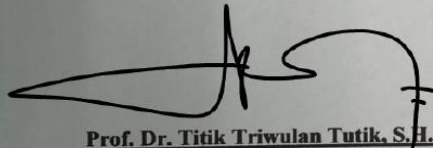
Nama Ahmad Zainuri
NIM 02040422028
Prodi Magister Hukum Tata Negara
Judul Tesis Penanganan Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu Di Indonesia
(Studi Atas Keppres Nomor 17 Tahun 2022 Tentang
Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak
Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu

Tesis yang telah ditulis ini telah diperiksa dan disetujui untuk mengikuti ujian.

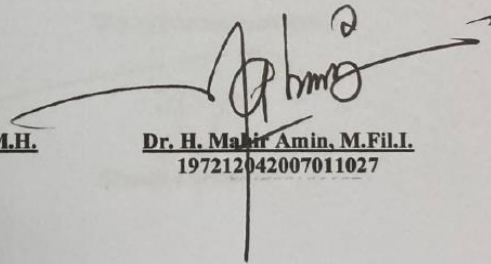
Surabaya, November 2023

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H.
196803292000032001



Dr. H. Makir Amin, M.Fil.I.
197212042007011027


PENGESAHAN TIM PENGUJI

PENGESAHAN TIM PENGUJI

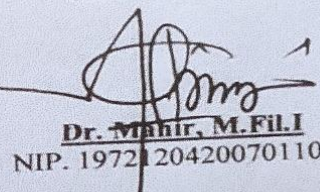
Tesis yang ditulis oleh Ahmad Zainuri, NIM. 02040422028 ini telah dipertahankan di depan sidang majelis munaqasah tesis UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari kamis tanggal 14 Desember 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program pascasarjana strata dua dalam prodi Magister Hukum Tata Negara

Majelis Sidang Munaqasah:

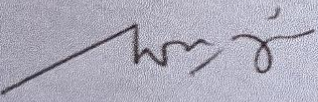
Ketua Penguji


Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H.
NIP. 196803292000032001

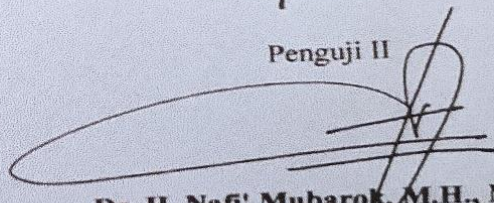
Sekretaris Penguji


Dr. Mahir, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027

Penguji I


Prof. Dr. Sri Warjiyati, M.H.
NIP. 196808262005012001

Penguji II


Dr. H. Nafi' Mubarak, M.H., M.H.I.
NIP. 197404142008011014

Surabaya, Desember 2023

Mengesahkan,

Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Direktur Pascasarjana,


Prof. H. Masdar Hilmy, M.Ag., Ph.D.
NIP. 197103021996031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Zainuri
NIM : 02040422028
Fakultas/Jurusan : Magister Hukum Tata Negara
E-mail : Zainuriibny@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)
Yang berjudul:

Penanganan Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu Di Indonesia (Studi Atas Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu)
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Desember 2023

Penulis


Ahmad Zainuri

ABSTRAK

Problematika yang terjadi pasca dikeluarkannya Keppres Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial yang tidak memenuhi aspirasi dan keterlibatan public sehingga mengakibatkan pengakomodiran terhadap perlindungan HAM berat masa lalu dan perlindungan hak korban mengalami pro kontra di masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu dan mengkaji konstruksi penanganan hak korban di dalam Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier dengan teknik analisis deskriptif dan teknik evaluative. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori hak asasi manusia, teori perundang-undangan, teori politik hukum dan teori kewenangan.

Hasil penelitian ini adalah 1) penanganan hak korban telah diatur dalam ketentuan UUD NRI 1945 secara mendasar mengenai HAM, TAP MPR Nomor IV/MPR/2000 yang membahas upaya penyelidikan korban, namun kewenangan Tim PPHAM dan Komnas HAM justru mengalami dualisme kewenangan. 2) Konstruksi hukum penanganan korban dalam Keppres Nomor 17 Tahun 2022 dilakukan secara terburu-buru sehingga kejanggalan atas upaya pemulihan pemerintah dan gagalnya pemerintah dalam mewujudkan kepuasan terhadap perlindungan HAM berat masa lalu di Indonesia.

Kata Kunci: HAM Berat Masa Lalu, Keputusan Presiden, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

The problems that occurred after the issuance of Keppres No. 17 Tahun 2022 concerning the Tim PPHAM did not meet the aspirations and involvement of the public, resulting in the accommodation of past serious human rights protections and the protection of victims' rights experiencing pros and cons in society. The aim of this research is to examine the handling of past serious human rights violations and examine the construction of handling victims' rights in Keppres No. 17 Tahun 2022.

This research method uses a normative juridical research type with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The sources of legal materials used in this research are primary legal material sources, secondary legal material sources, and tertiary legal material sources using descriptive analysis techniques and evaluative techniques. The theories used in this research are human rights theory, legislation theory, and victim protection theory.

The results of this research are: 1) the handling of victims' rights has been regulated in the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regarding human rights, TAP MPR Number IV/MPR/2000, which discusses efforts to investigate victims, but the authority of the Tim PPHAM and Komnas HAM actually experiences a dualism of authority. 2) The legal construction for handling victims in Keppres No. 17 Tahun 2023 was carried out in a rush, resulting in irregularities in the government's recovery efforts and the government's failure to achieve satisfaction with the past serious human rights protections in Indonesia.

Keywords: *Gros Violaition of Human Rights, Presidential Decree, Human Rights*

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
MOTTO	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Kerangka Teori dan Konsep	9
G. Kajian Pustaka	13
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II KONSEP HAM DAN TEORI PERUNDANG-UNDANGAN	25
A. Konsep Hak Asasi Manusia	25
B. Teori Kewenangan	30
C. Teori Politik Hukum	32
D. Teori Peraturan Perundang-Undangan.....	36
BAB III PENANGANAN KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU DI INDONESIA.....	45
A. Konsep dan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu Dalam Tinjauan Hukum Poistif di Indonesia	45

B. Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Korban HAM Berat di Masa Lalu Menurut Teori Kewenangan.....	57
BAB IV PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU DALAM KEPPRES NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN REKOMENDASI PENYELESAIAN NON-YUDISIAL DI INDONESIA	67
A. Politik Hukum Keppres Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial di Indonesia.....	67
B. Re-Regulasi Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial di Indonesia dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Korban HAM Berat Masa Lalu di Indonesia.....	82
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran-Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Perss, 2009.
- Abdurrahman, Soerjono dan H. *Metode Penelitian Hukum*,. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Acces, Smart Legal. "Sedang Mengerjaka Skripsi Pahami Dulu Jenis-Jenis Metode Penelitian Hukum." *Smart Legal Acces*. Last modified 2022. <https://smartlegalacademy.id/sedang-mengerjakan-skripsi-pahami-dulu-jenis-jenis-metode-penelitian-hukum>.
- Adhila. "Gugat Keppres 'Minta Maaf' Ke Anak PKI, Putera Jenderal A Yani: Jangan Putar Balikkan Sejarah!" *Suara Islam*. Last modified 2023. <https://suaraislam.id/gugat-keppres-minta-maaf-ke-anak-pki-putera-jenderal-a-yani-jangan-putar-balikkan-sejarah/>.
- Aji, Ahmad Mukri. "Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 2, no. 2 (2015).
- Al-Fatih, Sholahuddin, and Mujibur Rahman Khairul Muluk. "Understanding Beschikking, Regeling and Beleidsregel in Indonesian Legal System." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 2 (2023).
- Amin, Dkk Fakhry. *Ilmu Perundang-Undangan*. Banten: PT. Sada Kurnia Perkasa, 2023.
- Anggoro, Syahriza Alkohir. "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (2019).
- AR, Andi Bau Inggit. "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah." *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 1 (2019).
- Arif, Syaiful. *Islam Dan Pancasila Perspektif Maqashid Syariah*.

Yogyakarta: Cakrawala, 2023.

Arifin, Zaenal, and Adhi Putra Satria. "Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab Dan Solus." *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 9, no. 1 (2020).

Asikin, Amiruddin dan Zainul. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Di Indonesia." In *PN Gunung Sitoli*, 2019.

———. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Atmasasmita, Romli. *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. Jakarta: BPHN Jakarta, 2009.

Attamimi, A. Hamid S. *Proses Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Aspek Filsafat*. Semarang: Materi Kursus Perancangan Perundang-Undangan, 1990.

Baskara, Arga. "Hukum Sebagai Sistem Norma." *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2007).

BBC News Indonesia. "Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu: 'Menyerah Dari Tekanan Terduga Pelanggar, Saya Sangat Kecewa Terduga Dapat Jabatan.'" *BBC.Go.Id*. Last modified 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850597>.

Budimansyah, Dasim. *Hak Asasi Manusia*. Banten: Universitas Terbuka, 2015.

Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT. Bumi Sumekar Aksara, 2016.

- Cabui, Cornelia Evelin. "Refleksi Kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi Selama Tiga Tahun Pada Periode Kedua Pemerintahan." *Jurnal Adhikari* 1, no. 04 (2022). <https://journal.unindra.ac.id/index.php/terapeutik/index>.
- Chaterine, Rahel Narda. "Tugas Tim PPHAM Selesai, Presiden Jokowi Diminta Akui Soal Pelanggaran HAM Masa Lalu." *Kompas.Com*. Last modified 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/29/16035551/tugas-tim-ppham-selesai-presiden-jokowi-diminta-akui-soal-pelanggaran-ham>.
- Chirwa, Danwood Mzikenge. "The Doctrine of State Responsibility as a Potential Means of Holding Private Actors Accountable for Human Rights." *Melbourne Journal of International Law* 5, no. 1 (2004).
- Chrisbiantoro. "Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Masa Lalu." *Universitas Bung Karno* 1, no. 8 (2021).
- CNN. "Janji Berkarat Jokowi Tuntaskan Kasus HAM." *Cnn.Id*. Last modified 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211019201531-12-709920/janji-berkarat-jokowi-tuntaskan-kasus-ham/2>.
- DA, Ady Thea. "3 Catatan Imparsial Atas Terbitnya Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat." *Hukum Online*. Last modified 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/keppres-pembentukan-tim-penyelesaian-pelanggaran-ham-berat-1t63314bfed24e7/>.
- Dahniar, Dahniar. "Gross Violation of Human Rights in Aceh: Patterns of Violence through the Indonesian Government's Policy." *IOSR Journal of Humanities and Social Science* 22, no. 05 (2017).
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Dkk, Nandang Alamsah. *Teori & Praktek Kewenangan*

- Pemerintahan*. Bandung: Unpad Press, 2017.
- Dwiati, Ira. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana.” Universitas Diponegoro Semarang, 2007.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normati Dan Empiris*. Depok: Prenada media, 2016.
- Effendi, Mansyur. *Dimensi Dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*,. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Eko, Hidayat. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia.” *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016): 81.
- ELSAM. “Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Dan Kesatuan Nasional.” *Elsam.or.Id*. Last modified 2014. <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/ketetapan-mpr-nomor-vmpr2000-tentang-pemantapan-dan-kesatuan-nasioanal/>.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Gandara, Moh. “Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat.” *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020).
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Hakim, Lukman, and Nalom Kurniawan. “Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2022).
- Hakim, Suparlan Al. *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Konteks Indonesia*. Malang: Madani, 2016.
- HAM, Komnas. “Komnas HAM-Tim PPHAM Bersinergi Dalam Pemenuhan Dan Pemulihan Hak Korban.” *Komnas HAM*. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/12/14/2286/komnas-ham-tim-ppham-bersinergi-dalam->

pemenuhan-dan-pemulihan-hak-korban.html.

- Hardiyanti, Dini. "Rahayu Dkk, Tanggung Jawab Negara Menyelesaikan Kasus Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu Melalui Proses Rekonsiliasi Di Indonesia,." *Diponegoro Law Jurnal* 5, no. 3 (2016).
- Haryanto, Tenang, Johannes Suhardjana, A. Komari A. Komari, Muhammad Fauzan, and Manunggal Kusuma Wardaya. "Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 2 (2013).
- Hasim, Hasanuddin. "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem." *Madani Legal Review* 1, no. 2 (2017).
- Herman, Herman, and Firman Muin. "Sistematisasi Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 4, no. 2 (2018).
- Huda, Nikmatul. "Hierarki Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2006).
- Ilyas Putra Fatchrurhozi, Hardiyanto. "The Handling Of Victims Of Past Gross Human Rights Violations Based On Rule Of Law Concept And Democracy." *Jurnal Lawnesia* 2, no. 1 (2023).
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan Jilid 1*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2007.
- Indroharto. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Isharyanto. *Politik Hukum*. Mojolaban: CV. Kekata Group, 2016.
- Isra, Saldi. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2016): 417.
- Iver, Robert Mac. *The Modern State*. London: Oxford University Press, 1926.

- Jailani, Muhammad. “Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia.” *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* XIII, no. 1 (2011).
- Johan Nasution, Bahder. “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern.” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014).
- Kantor Staf Presiden Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Lima Tahun Maju Bersama. Kantor Sekretariat Presiden*, 2019. <https://kemensos.go.id/uploads/topics/15714756181367.pdf>.
- Khalid. *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: Cv. Manhaji dan Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, 2014.
- Kira, Joseph Hugo Vieri Iusteli Sola. “Implementasi Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dan Kekuasaan Kehakiman.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 3 (2023).
- Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). *Catatan Kritis Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu (Tim PPHAM)*, 2022.
- Komnas HAM. “Catatan Kritis Empat Tahun Pemerintahan Joko Widodo.” <https://www.komnasham.go.id/>. Last modified 2018. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/10/19/647/catatan-kritis-empat-tahun-pemerintahan-joko-widodo.html>.
- Kusnadi. *Hakikat Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2019.
- Latifah, Marfuatul. “Urgensi Indonesia Menjadi Negara Pihak Statuta Roma Bagi Perlindungan HAM Di Indonesia.” *Jurnal Politica* Vol.5, no. No.2 (2014). <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/341>.

- Liwanga, Roger-Claude. "The Meaning of Gross Violation of Human Rights: A Focus on The Meaning of Gross Violation of Human Rights: A Focus on International Tribunals' Decisions over the DRC Conflicts International Tribunals' Decisions over the DRC Conflicts." *Denver Journal of International Law & Policy* 44, no. 1 (2015).
- Marlina, Heni. "Pengaruh Global Terhadap Pembaharuan Hukum Nasional." *Varia Hukum X*, no. 17 (2018).
- Marnex L., Tatawi. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban (Kajian Undang-Undang No. 31 Tahun 2014)." *Lex Et Societatis* 3, no. 7 (2015).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perenada Media Group, 2007.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Hukum*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Marzuki, Suparman. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pustaka UII, 2017.
- . *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014.
- . "Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran Ham Masa Lalu: Melanggengkan Impunity." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 2 (2010).
- MD, Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Miharaja, Marjan. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: CV. Cendikia Press, 2022.
- Mujaddidi, Sipghotulloh. "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2022): 540.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Hakikat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.

- Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpona Tujuh Publishing, 2016.
- Natarajan, Mangai. *Kejahatan Dan Pengadilan Internasional*. Banyuwangi: Nusa Media, 2015.
- Ngani, Nico. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Pustaka yustisia, 2012.
- Nola, Luthvi Febryka. "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)." *Negara hukum* 7, no. 1 (2016).
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/949>.
- Notohamidjojo, O. *Makna Negara Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.
- Nugraheny, Dian Erika. "Jokowi Teken Keppres 4/2023, Bentuk Tim Pemantau Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Secara Non-Yudisial." *Kompas.Com*. Last modified 2022.
<https://nasional.kompas.com/read/2023/03/16/14003161/jokowi-teken-keppres-4-2023-bentuk-tim-pemantau-penyelesaian-pelanggaran-ham>.
- Nurani, Risma Sri. "Aktualisasi Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2, no. 3 (2022).
- Nurhayati, Nunik. "Quo Vadis Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Melalui Jalur Non Yudisial." *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 2 (2017).
- Nurhidayatulloh. "Gross Violations of Human Rights: Praktik Pengadilan HAM Internasional Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia." *PusHAM UII*, no. April (2015).
- Nurliah Nurdin, Astika Ummy Athahira. *HAM, Gender, Dan Demokrasi*. Jakarta: CV. Sketsa Media, 2016.
eprints2.ipdn.ac.id.

- Permata, Diah, and Megawati Setiawati. "The Leadership of President Megawati in the Era of Multidimensional Crisis , 2001-2004." *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* 11, no. 1 (2022).
- Pratiwi, Cekli Setya. *Penjelasan Hukum Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2016.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022).
- Priyosantoso, Rudi. "Hak Asasi Manusia Di Indonesia : Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 15, no. 3 (2022).
- Rahmadhani, Dewi, Suci, and Winarno Budyatmojo. "Tinjauan Teori Perundang-Undangan Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Kpk." *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* / 1, no. 2 (2022).
- Said, Abdul Rauf Alauddin. "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas - Luasnya Menurut UUD 1945." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2015). <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/613/552>.
- Santoso, Bambang. *Politik Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2021.
- Santoso, Iwan, Murtir Jeddawi, Yana Sahyana, and Romli Arsyad. "Gross Human Rights Violations Research Trend: A Bibliometric Analysis and Future of Research Agenda (Tren Riset Pelanggaran HAM Berat: Analisis Bibliometrik Dan Agenda Riset Masa Depan)." *Jurnal HAM* 14, no. 1 (2023).
- Saputra, Ozi. "Penegakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Dalam Politik Hukum DI Indonesia: Studi

Kasus Timor Timur.” *Jurnal Islamic and Law Studies* 5, no. 1 (2022).

Sari, Annisa Medina. “Hierarki Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia.” <https://Fahum.Umsu.Ac.Id/>. Last modified 2023. [https://fahum.umsu.ac.id/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/#:~:text=Hierarki peraturan perundang – undangan adalah,mengatur aturan yang lebih rendah.](https://fahum.umsu.ac.id/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/#:~:text=Hierarki%20peraturan%20perundang%20%E2%80%93%20undangan%20adalah,mengatur%20aturan%20yang%20lebih%20rendah.)

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Sugiharto, Gatot. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Ham Berat Dalam Sistem Peradilan Pidana.” Universitas Islam Indonesia, 2006.

Sujatmoko, Andrey. *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Sunarso. *Pendidikan Hak Asasi Manusia*. Surakarta: PT. Indotama Solo, 2020.

Suparjan, Edy. “Peristiwa G 30 S Sebagai Isu Kontroversial Pada Mata Pelajaran Sejarah Di SMA Kota Bima.” *Jurnal Pendidikan Sejarah* 5, no. 1 (2017).

Supriyanto, Bambang Heri. “Law Enforcement Regarding Human Rights According to Positive Law in Indonesia.” *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 3 (2014): 152.

Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Syafiie, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Refika Aditama, 2020.

Syamsuddin Radjab. “Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Era Pemerintahan Jokowi-JK.” *Jurnal Politik*

Profetik 6, no. 2 (2018).

Syarif, Zalfah Alin. “Penjelasan Krisis Multidimensi, Krisis Ekonomi, Krisis Sosial, Krisis Politik, Hukum, Dan Tuntutan Reformasi.” *Pikiran Rakyat*. Last modified 2022. <https://majalengka.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-543746311/penjelasan-krisis-multidimensi-krisis-ekonomi-krisis-sosial-krisis-politik-hukum-dan-tuntutan-reformasi>.

Tanto Lailam. “Konstruksi Pertentangan Norma Hukum Dalam Skema Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014).

Tarigan, Jefri Porkonanta. “Akomodasi Politik Hukum Di Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya Political of Law ’ s Accommodation for Human Rights in Indonesia Based on Thought Generation.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017).

Teddy, Armin. “Sejarah Negara Tuhan.” *Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam* 3, no. 2 (2018).

Tjandra, Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Trias Saputra, Yudha Adi Nugraha. “Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana.” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (2022).

Triyanto. “Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional.” *Jurnal PPKn* 1, no. 1 (2013). <http://ppkn.org/wp-content/uploads/2014/05/Regulasi-Perlindungan-HAM-Internaspdf>.

Tutik, Titik Triwulan. “Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu Dan Teori Ilmu Hukum.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 3 (2012).

———. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.

- . *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2016.
- . *Sistem Hukum & Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Surabaya: Bahan Ajar Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Usman. “Negara Dan Fungsinya.” *Al-Daulah* 4, no. 1 (2015). http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1506/1445.
- Virna Tirtasari Setyowati, Sunny Ummul Firdaus. “Peraturan Perundang-Undangan Melalui Proses Rekonsiliasi.” *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 1 (2022).
- Wahyono, Padmo. *Guru Pinandita*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984.
- Waluyo, Bambang. *Vitikmologi: Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Widarto, Joko. *Diktat Ilmu Perundang-Undang*. Jakarta: Esa Unggul, 2020.
- Winardi, Sirajuddin dan. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.
- Yulia, Rena, and Aliyth Prakarsa. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal.” *Jurnal Yudisial* 13, no. 1 (2020).
- Zainuri, Ahmad. “Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 Tentang Penghapusan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Di Indonesia Terhadap Korban HAM Berat Di Indonesia.” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Tap MPR Nomor IV/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional

Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu.

Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantauan Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A